

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

##### **1. Upaya yang dilakukan Polisi DIY dalam Penanggulangan Tindak pidana Kesusilaan**

Berdasarkan wawancara dengan narasumber Bapak Kompol Zulham Efendi Lubis, S.iK dalam hal Penanggulangan tindak pidana kesusilaan dengan korban anak Polisi menggunakan 3 (tiga) upaya yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif.

##### **1. Upaya Pre-emptif**

Upaya pre-emptif adalah upaya untuk mendeteksi keadaan awal, pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Upaya pre-emptif ini memerlukan adanya peran intelejen untuk memberikan informasi.<sup>35</sup>

##### **2. Upaya Preventif**

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Upaya preventif yang dilakukan Polisi DIY lebih kepada sosialisasi dimasyarakat, antara lain:

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Kompol Zulham Efendi Lubis, S.IK. Kepala Unit VC Polda DIY.

- a. Polisi DIY mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak disekitar lingkungan mereka.
- b. Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar segera melapor kepada pihak yang berwenang.
- c. Polisi DIY memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya.

Dilakukannya berbagai upaya preventif ini ditujukan agar masyarakat dapat membantu Polisi DIY secara langsung untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Upaya preventif ini diharapkan dapat menekan tingginya angka tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang terjadi setiap waktu.<sup>36</sup>

### 3. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. Upaya represif mendasarkan pada bukti awal yang ada, melakukan penangkapan dan diteruskan pada langkah penyidikan dengan menghubungkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

---

<sup>36</sup> Ibid.

Negara Republik Indonesia dan bila bukti itu telah cukup maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan.

Dilakukannya upaya represif ini bertujuan untuk pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak akan diperiksa dan dilakukan penyelidikan guna mencari bukti-bukti awal yang kemudian akan dilakukan penyidikan untuk memastikan kejahatan yang mereka perbuat. Setelah mendapat banyak bukti serta saksi maka akan dapat diteruskan ke pengadilan dan akan mendapat putusan hakim.<sup>37</sup>

Upaya represif ini merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada penindakan/pemberantasan setelah tindak pidana kesusilaan terhadap anak itu terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa upaya represif yang dilakukan adalah dengan menangkap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Proses penegakan hukum pidana termasuk tindak pidana kesusilaan terhadap anak ini melalui suatu sistem yang terdiri dari empat tahap proses, yaitu:

- a. tahap penyelidikan / penyidikan;
- b. tahap penuntutan;
- c. tahap pemidanaan; dan
- d. tahap pelaksanaan.

---

<sup>37</sup> Ibid.

Masalah tindak pidana kesusilaan terhadap anak ini merupakan masalah yang kompleks dan perlu menjalin kerjasama khususnya dalam penanganan kasus dan perlindungan korban guna memastikan korban mendapatkan haknya atas perlindungan keamanan pribadi korban, kerahasiaan identitas diri, namun karena kurangnya kerjasama sektor pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing, sehingga mengakibatkan korban belum dapat merasakan perlindungan yang maksimal dan hal itu berakibat juga dalam hak penegakan hukum dimana tersangka/pelaku akhirnya mendapat hukuman tidak maksimal sesuai perbuatannya.

## **2. Kendala yang dihadapi Polisi DIY dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan**

Polisi DIY berharap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya dan meminta perlindungan, tetapi pada kenyataannya fakta tersebut belum juga ditemukan sampai sekarang. Adapun kendala yang dihadapi Polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana kesusilaan dengan korban anak dapat digolongkan menjadi 2 faktor, yaitu:

### **a. Faktor Internal**

1) Sumber Daya Manusia, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah polisi. Kurangnya pengetahuan, keahlian, kemauan, kemampuan dan kurang

menguasai teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap penanganan kasus tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

2) Sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung untuk mempermudah pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

3) Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan tugas terutama dalam menegakkan hukum dan keadilan serta melindungi sekaligus menyelesaikan masalah yang dihadapi anak korban tindak pidana kesusilaan , dari perspektif hukum koordinasi ini tidak hanya terbatas padasesama penegak hukum melainkan juga dengan instansi lain.

4) Polda mengalami kesulitan untuk memperoleh laporan.

#### b. Faktor Ektsernal

1) Masih banyaknya orang tua yang kurang menghargai anak.

2) Tingkat pendidikan masyarakat rendah.

3) Dari segi ekonomi kurang mampu sehingga banyak orang tua yang kurang memperhatikan anak.

### B. Saran

1. Masyarakat khususnya orang tua lebih menyadari akan bahaya dari tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Masyarakat dalam hal ini orang tua hendaknya dapat membantu memberikan informasi tentang adanya tindak

pidana kesusilaan terhadap anak disekitar lingkungannya kepada pihak kepolisian.

2. Bagi polisi kiranya dapat mendekatkan diri lagi dengan masyarakat supaya informasi dari masyarakat mengenai pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang disampaikan dapat diterima dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer kelompok gramedia.

Bambang Purnomo, *Laporan Hasil Penelitian Tentang Masalah Remaja di Yogyakarta*, Seksi Kepidanaan dan Kriminologi FH UGM, 1972/1973

Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta .

Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita: Jakarta.

Moelyatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.

Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT. Grasindo, Jakarta

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, LaksBang Mediatama, Surabaya.

P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keadilan*, Mandar Maju, Bandung.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, C.V Novinda Mandiri, Jakarta.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang, Yogyakarta.

### Website :

<http://www.harianjogja.com/baca/2013/10/09/kasus-pencabulan-dua-bocah-laki-laki-dicabuli-rekannya-sendiri-455003>

[www.jogja.polri.go.id](http://www.jogja.polri.go.id)

[www.wikipedia](http://www.wikipedia)korbankejahatan.com

Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*”, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

Anonik, 2012, “*Polisi*” <http://id.wikipedia.org/wiki/polisi>

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Lembaran Negara Nomor 4235.